

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF: Upaya Menyingkap Dimensi Pluralis dalam Pendidikan Akidah-Akhlak

Oleh Zuly Qodir

Alumni Ponpes Almunawwir Krapyak Yogyakarta,
Peneliti di Institut DIAN/Interfidei Yogyakarta.



Pendahuluan

Sebagai sebuah agama, Islam memang diyakini memiliki dasar legitimasi yang cukup kuat untuk dapat dikatakan sebagai agama yang komprehensif. Hanya saja untuk dapat menjelaskan secara ilmiah-rasional kepada publik sehingga khalayak percaya bahwa Islam memang mempersiapkan perangkat-perangkat yang menyeluruh berkaitan dengan tatanan dunia baru yang sarat dengan ketidakpastian, bahkan dapat dikatakan *hopeless* bukan hal yang gampang. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa mengatakan Islam sebagai agama yang lengkap dan mampu menawarkan cara baru dengan berbagai hal yang menantang di depan tokoh-tokoh agama (termasuk pendidik), tanpa sebuah kerangka yang jelas dan sistematis, sebenarnya dapatlah dikatakan sebagai apologia semata terhadap Islam itu sendiri. Jika pada kenyataannya, yang mampu mempersiapkan perangkat-

perangkat dalam menghadapi segala jenis tantangan dunia global adalah mereka yang tidak secara tegas menyatakan dirinya beragama Islam. Demikian juga dalam dunia pendidikan, mereka lebih serius dalam mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas menghadapi *new era* yang penuh tantangan tersebut, ketimbang institusi pendidikan Islam yang kurikulumnya sarat dengan materi-materi yang sifatnya eskatologis, ketimbang realitas empirik.

Dunia pendidikan Islam (institusi pendidikan) yang diharapkan mampu memberikan perspektif dan wawasan baru akan menjadi sorotan tajam, tatkala produk (baca: anak didiknya) tak lebih dari sekadar robot-robot yang mampu bekerja sesuai *remote control* (program semata), di luar program, maka anak didik tidak memiliki daya kreativitas maupun nalar yang sanggup diandalkan untuk berkompetisi. Dunia pendidikan menjadi sorotan karena

institusi inilah yang bisa dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi tumbuhnya generasi yang lebih baik dan berkualitas. Jika demikian, bukankah itu ironis.

Oleh karena itu, janganlah menyesal bila institusi pendidikan Islam berada jauh di belakang ketimbang pendidikan yang dikelola oleh pihak di luar Islam, yang acapkali dipersiapkan secara lebih matang, sehingga produknya mampu bersaing di pasaran kerja, di mana masyarakat memang belakangan mengarah pada persaingan global dan lebih condong pada hal-hal yang riil di sini serta segera sebagai salah satu akibat dari *global market* (globalisasi) yang tidak mungkin ditolak datangnya. Jika boleh dikatakan, maka masyarakat baru di tengah globalisasi merupakan masyarakat yang lebih familiar dengan tuhan-tuhan baru dengan t kecil ketimbang T besar, misalnya pada seorang siswa ditawarkan apa yang akan dipilih ketika sakit flu berat, apakah memilih berdo'a atau Stop Cold atau Neozep, jangan heran jika jawabnya adalah memilih Stop Cold atau Neozep. Pilihan ini didasarkan pada alasan bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang "tolol" karena jelas yang akan dipilih adalah yang akan memberi kesembuhan, sedangkan berdo'a merupakan upaya setelah meminum obat baru kemudian Tuhan menyembuhkan (Neil Postman, 2001). Tetapi bagaimana agar siswa memahami makna pertanyaan di atas kemudian memilih berdo'a (Tuhan) inilah yang harus dipikirkan oleh seorang pendidik akidah-akhlak dalam mendidik.

Pilihan masyarakat atas institusi pendidikan akan didasarkan pada kualitas

yang ditawarkan, bukan pada nama (lebel) yang disandangnya. Dalam kondisi seperti itu, apa yang dapat ditawarkan oleh institusi pendidikan Islam, merupakan pertanyaan yang masih menggantung, jika melihat kenyataan di lapangan betapa banyaknya pendidikan yang dikelola oleh Islam, namun kualitasnya jauh dari harapan publik. Memang terdapat beberapa institusi pendidikan Islam yang memiliki mutu sebanding dengan institusi pendidikan yang dikelola oleh pihak di luar Islam, seperti SD Muhammadiyah Sapen, SMU Muhammadiyah I (keduanya di Yogyakarta), SMU Madania, SD-SMU Al Azhar di Jakarta, tetapi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat sekolah di institusi pendidikan Islam bergengsi tersebut? Bukankah tidak semua orang mampu, apalagi mereka yang tergolong kelas ekonomi menengah ke bawah. Institusi pendidikan Islam yang bermutu akhirnya sama persis dengan institusi pendidikan berharga mahal, yang hanya dapat dijangkau oleh golongan elite atau pun menengah ke atas (*high* dan *midle class*).

Perkembangan informasi dan teknologi jelas menawarkan banyak hal, namun tidak sedikit yang mencemaskan, terutama bagi perkembangan anak. Hal ini karena dengan teknologi dan informasi, nyaris dunia ini tanpa batas yang jelas, ibarat kulit bawang yang demikian tipis batasannya. Berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain, seperti Amerika, Eropa selang beberapa waktu saja sudah dapat dilihat di negeri kita ini. Contoh konkret misalnya, pesta sepak bola liga Italia, Inggris dan Spanyol atau siaran Piala Dunia dapat secara langsung

dinikmati oleh pecandu sepak bola (bolamania) hanya dalam hitungan jam yang berbeda, di mana semua kejadian di sana secara langsung dapat kita tonton bersama!

Dalam dunia yang demikian sempit macam itu, seorang guru (pendidik) maupun orang tua tidak sanggup mengawasi sepanjang hari apa yang terjadi pada anak-anaknya (anak didiknya). Pergaulan terjadi lintas agama, lintas etnis dan lintas ideologi, tak sanggup dikontrol secara terus-menerus. Bahkan, melakukan kontrol yang over dosis kepada anak-anak kita dapat dikatakan sebagai sebuah perlakuan membuat “penjara bagi anak-anak”, sehingga dapat saja seorang anak terlihat pendiam, tenang, *adem ayem*, taat dan patuh pada orang tua ketika di rumah atau di sekolah, namun di luar jam sekolah dan di luar rumah sangat urakan! Tentu banyak penyebab mengapa anak dapat menjadi demikian urakan, nakal bandel bahkan bengis.

Sekali lagi pergaulan lintas agama, lintas etnis, dan lintas ideologi tidak mungkin lagi dapat dihindari kecuali anak-anak kita akan “dikubur hidup-hidup” dalam rumah yang penuh berbagai macam peraturan yang diharapkan mampu mengontrol anak-anak. Namun tetap saja tak bisa terjadi dengan pasti. Hal ini disebabkan oleh masuknya informasi bukan saja lewat pelajaran di sekolah atau dari orang tua, tetapi lewat televisi, radio, majalah, internet dan sebagainya.

Dunia sinetron, telenovela, film kartun, film-film kekerasan, film percintaan yang bernuansa romansa dapat dikatakan

sebagai gambar dunia kita yang sebenarnya dihadapi. Di mana perselingkuhan, pertarungan, persengketaan antarindividu, antarkelompok, main belakang, menjadi penjilat, pecundang, senantiasa bersilat lidah, oportunistis, kesengsaraan, ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, ketabahan, KKN, pamer kekayaan, selundupan senjata, minum-minuman keras, obat-obatan (baca: narkoba), *ngedrug*, hedonis, cemburu, cinta, dendam menjadi gambar yang sangat jelas bagaimana “wajah kita” tergambar di sana.

Dalam kondisi yang semacam itu, memang seorang pendidik akan sangat khawatir dengan siswanya (anak didiknya) yang masih berusia anak-anak atau remaja. Ketakutan terhadap kemungkinan-kemungkinan pengaruh negatif memang cukup beralasan dan dapat diterima, namun sampai mengalami semacam paranoid terhadap perkembangan informasi yang membanjir, apalagi tidak disertai dengan sebuah upaya yang sistematis bagaimana agar anak-anak remajanya atau anak didiknya mampu memahami apa yang terjadi sebenarnya di lingkungan sekitar menurut hemat saya takkan banyak menolong. Salah satu yang akan mampu menolong adalah pendidikan, namun pendidikan yang macam apa dan bagaimana merupakan pertanyaan serius yang harus dijawab. Untuk itulah, tulisan ini akan difokuskan pada kurikulum pendidikan akidah-akhlak, di tingkat SLTP/MTs dan SMU/MA, di mana mata pelajaran ini dapat dianggap sebagai materi pendidikan yang akan membentuk manusia berkarakter, karena manusia berkarakter

inilah yang sebenarnya miskin dalam pendidikan akidah-akhlak. Jika dulu orang berharap karakter anak didik akan dapat dibentuk melalui Pendidikan Moral Pancasila (sekarang PPKn), ternyata yang terjadi adalah “formalisasi” dan indoktrinasi ideologi oleh guru-guru atas ideologi negara, maka sekarang mestinya akidah-akhlak tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pendidikan Agama Islam semasa Rezim Orba

Pengalaman terpenting yang dapat kita ambil dari berkuasanya rezim Orde Baru adalah terpusatnya seluruh kebijakan pada satu orang, yakni presiden Soeharto, ketika itu. Soeharto dengan amat canggih memoles kekuasaan otoriter-diktator menjadi kekuasaan yang terkesan populis dan mensejahterakan rakyat banyak. Kekuatan-kekuatan politik di negeri ini ketika Soeharto berkuasa benar-benar dibuat tunduk dan tak berdaya di hadapannya. Para elit politik tak lebih dari sekadar “kambing congek” yang senantiasa mengembik di hadapan sang “induk” (tepatnya sang bos) yang dianggap berjasa memberi makan. Nyaris mustahil untuk dapat menemukan pejabat atau elit politik yang secara tegas berani menentang *policy* yang sebenarnya jelas-jelas tidak sesuai hati nuraninya. Berani dengan apa yang telah Soeharto putuskan dengan dukungan tentara beserta pembantu-pembantunya dapat dipastikan “tidak akan selamat” rezekinya, alias bersiap-siaplah untuk dimutasi, bahkan diberhentikan.

Sentralisasi amat nyata, sehingga

otonomi dalam pembuatan kebijakan dipastikan tidak terjadi. Politisasi agama (Islam) sebagai agama mayoritas demikian juga sangat kentara, sehingga jika terdapat para mubaligh atau pendakwah yang berbicara agak keras, tuduhan “ekstrem kanan” harus siap diterimanya. Sedangkan bagi mereka yang terlalu berbau kekiri-kirian atau berpikir ala Marxis, atau mempersoalkan ketidakadilan berdasarkan kelas, maka siap-siap untuk dituduh “ekstrem kiri”, yang diartikan sama persis dengan PKI. Dua ketegori tuduhan yang sangat tidak beradab ini sangat kental ketika rezim Orde Baru di bawah Soeharto dengan kekuatan tentara berkuasa. Rakyat bahkan hanya menjadi bahan intaian untuk dijebloskan ke dalam penjara, atau diekskomunikasi. Tidak ada ruang publik yang benar-benar mampu memberikan tempat bagi kreativitas dan ekspresi keimanan maupun pendapat. Kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin undang-undang hanyalah jargon politik kosong belaka.

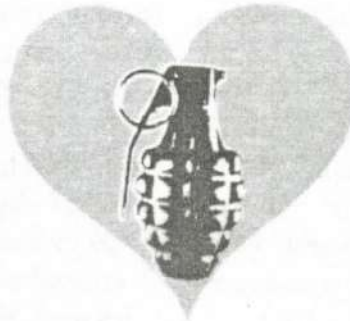
Perlakuan yang demikian oleh rezim Orde Baru tidak ada bedanya dengan perlakuan kolonialisme atas rakyat Indonesia dengan menerapkan politik *divide et impera*. Sebuah politik memecah belah rakyat dengan sesama rakyat, karena di antara mereka dihadirkan untuk saling bermusuhan. Politik SARA, khususnya Islam menjadi kebanggaan rezim karena diharapkan akan menjadi sumber utama dukungan dan legitimasi dalam kekuasaannya. Berbagai kegiatan yang seakan-akan berbau Islam dikemas dengan segala ritualnya yang magis. Sekadar contoh

misalnya, diloloskannya UUPA, pemakaian jilbab di sekolah-sekolah umum, dan yang paling sensasional adalah dibentuknya ICMI akhir 1990-an (Bahtiar Effendy, 1998a; 2001a). Di samping dukungan Jenderal Soedomo yang mencoba membubarkan SDSB atau Porkas, sebagai sumber dana olah raga Indonesia atas desakan umat Islam adalah bukti-bukti lain bagaimana Islam sangat kuat sebagai ideologi politik negara.

Perjalanan sejarah agama-agama di negeri ini, bahkan bisa dibilang sarat dengan konflik kekerasan yang tidak kondusif bagi hubungan antaragama. Pertikaian antaragama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat beragama yang *notabene* pluralis. Agama-agama harus menanggung luka dan derita yang dibuat oleh rezim Orde Baru dengan segala macam upacara-upacara ritualistiknya yang magis. Elit politik terjebak dalam wacana yang dikonstruksi oleh rezim. Agama-agama tidak memiliki kekuatan untuk mengerem agar tidak terjebak dalam “permainan” yang dikemas oleh kekuasaan, sehingga agama kehilangan daya kritis dan pembebasan. Yang tersisa dari agama-agama dalam sejarah Orde Baru adalah agama yang menjadi justifikasi atas keputusan rezim politik. Tujuan-tujuan politik kekuasaan tertentu dibalut dengan jargon-jargon agama, sehingga elit agama (baca: pemimpin agama) hanya menjadi pembenar acara-acara ritualistik semata.

Ideologisasi agama (Islam) menjadi kecenderungan yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. “Doa-doa politik” digelar untuk mendukung seorang penguasa, atau pertemuan-pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh agama menjadi ajang pertunjukan agama-agama untuk mendapatkan “simpati” dari penguasa. Bahkan hal semacam itu merambat pada institusi pendidikan Islam.

Disebabkan Islam dijadikan sebuah ideologi negara, maka pendidikan Islam sebagai salah satu bagian tak terpisahkan pun tak lepas dari “proses pembusukan” yang sangat dalam. Pendidikan Islam digelar dalam ritme rezim yang sangat intoleran dan sektarian. Pembusukan pendidikan Islam terjadi



bukan saja pada tingkat menengah ke atas (MTs/MA atau SLTP/SMU), tetapi sejak dari tingkat dasar (SD/MI). Bagaimana anak-anak sekolah yang beragama, berbeda-beda agama harus memiliki pola pikir yang satu, dan searah. Pendidikan Islam dikerjakan dengan amat kaku dan doktrinal, bukan pada proses pengembangan sikap dan nalar kritis peserta didik. Peserta didik didisain oleh pendidik dalam kerangka pengajaran yang sangat menekankan kognisi, bukan aspek *value* dan psikomotorik sehingga berimplikasi pada perilaku keseharian dalam pertemanan dan bertetangga. Dengan model pendidikan doktrinal semacam itu tak heran jika kemudian melahirkan generasi yang “bernalair negatif” terhadap perbedaan dan

heterogenitas karena yang terprogram adalah homogenisasi (*unity*). Perbedaan karena itu dianggap tidak benar, bahkan melanggar aturan bersama.

Orde Baru dengan demikian dapat dikatakan sangat sukses melakukan “pembusukan nalar pendidikan” anak-anak, terutama melalui pendidikan agama. Keberbagaian agama dijadikan “ajang permainan politik” yang mendarah daging, sehingga sepanjang sejarah Orde Baru pembicaraan secara terbuka tentang SARA nyaris tidak ada, bahkan membicarakan SARA ibarat membicarakan barang haram, tak lebih dari “anak haram jadah”, padahal SARA inilah yang telah membentuk Indonesia (Th. Sumartana, 2001). Perbedaan SARA dipolitisir untuk memecah belah rakyatnya sendiri. Tidak ada penghormatan dan penghargaan sama sekali terhadap kemajemukan SARA.

Proses “pembusukan nalar” peserta didik ini dikemas dalam materi kurikulum yang sifatnya doktrinal seperti telah disinggung di atas. Materi pelajaran hanya mengelaborasi hal-hal yang bersifat mengarah pada perbedaan, bahkan pertikaian dan permusuhan, bukan mengarah pada pencarian bersama tentang hal-hal *perennial* yang terdapat dalam agama-agama, seperti keadilan, kejujuran, pembelaan terhadap kaum *dhua’afa*, kaum minoritas, perempuan dan mereka yang terpinggirkan secara kultur maupun struktur. Kurikulum pendidikan Islam di-*setting* dengan nalar penguasa yang anti dialog dan intoleran, bahkan parokial. Perbedaan agama yang terjadi di sekolah, di masyarakat tidak dipandang sebagai

“kekayaan” yang bukan saja harus diyakini karena berkah Tuhan, namun menjadi kesadaran bersama (*collective consciousness*) tidak pernah digagas, apalagi ditumbuhkan. Sikap pluralis (*pluralisme*) tidak pernah tercetus dalam benak pendidik yang telah terasuki ruh jahat rezim yang nyata-nyata anti pluralitas agama. Yang dikembangkan oleh pendidik melalui materi kurikulumnya adalah sikap monolitik dan keseragaman.

Pendidikan yang seperti itu adalah jelas sebuah model pendidikan yang sangat formalis, yang dalam bahasa fiqihnya adalah sebuah pendidikan yang terlalu berorientasi pada kulit luar (*syariah*), sehingga pendekatannya halal-haram, benar-salah, hitam-putih, tidak ada alternatif yang bisa diperdebatkan bersama secara terbuka dan kritis. Pendidikan Islam yang demikian merupakan pendidikan yang “mekanis”, sehingga nalar diarahkan hanya berpikir sesuai program standar, bukan di luar itu. Pendidikan semacam ini juga sama persis dengan pendidikan yang diterapkan pada robot-robot, jika robot dianggap dapat dididik.

Apa yang terjadi dengan pola pendidikan Islam yang seperti itu, tidak ada lain kecuali para penghafal yang mungkin handal, namun bukan untuk memahami makna/isi dari apa yang diajarkan. Pendidikan model ini juga tidak dapat disangkal hanya mampu menghasilkan peserta didik/siswa yang memiliki pengetahuan (*kognisi*), namun diragukan efek pengamalannya yang kita sebut sebagai akhlak. Peserta didik hafal dengan apa yang diajarkan pendidik, karena jika tidak hafal bisa tinggal kelas, alias tidak

lulus, sebuah akibat yang dianggap fatal! Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi *buffer zone* hidup dalam harmoni di tengah pluralisme SARA tidak tampak sama sekali, bahkan sebaliknya pendidikan Islam menjadi “batu sandungan” untuk hidup bertoleransi.

Pendidikan yang bersifat formalis, secara logis dapat diduga bahwa proses pendidikan tidak berjalan secara komunikatif dengan realitas yang ada, di samping juga menciptakan peserta didik yang tidak sanggup menyatakan diri. Hal ini karena ekspresi tertentu yang berbentuk pertanyaan atau komentar dibatasi, atau bahkan sering dihambat. Dalam format lain dapat dikatakan bahwa pendidikan (tepatnya pengajaran) agama tidak lebih dari sekedar deteriorisasi, karena kebiasaan dari fotokopi dan diktat atau buku teks, maka jangan heran kalau pendidik tidak lebih dari seorang “diktator” atau peserta didik hanyalah “copier”. Apa yang terjadi selanjutnya dengan proses belajar-mengajar agama seperti itu? Tidak ada lain kecuali pendidikan adalah mendengarkan “ceramah” guru, kemudian dicatat, atau dihafalkan, sehingga proses eksplorasi menjadi mandul, bahkan berhenti sama sekali. Pendidikan Islam tidak lain dari proses panjang ideologisasi negara atas Islam karena rezim mengetahui bahwa Islam merupakan salah satu kekuatan yang dapat dianggap “mampu” menyelamatkan, selain tentara dan polisi.

Demikian itulah *setting* kurikulum pendidikan Islam sepanjang rezim Orde Baru. Kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir “membela rezim”

berkuasa, bukan menjadikan peserta didik kritis, mampu berargumentasi, berbeda pendapat, atau mampu menganalisis masalah yang berkembang di tengah masyarakatnya. Pola konstruktivisme menjadi pola baku yang seakan-akan tidak bisa dirubah, sehingga model memahami agama menjadi sangat kaku, karena memang berjalan dari logika deduktif induktif, bukan induktif, baru kemudian sintesa dan kesimpulan akhir yang diperoleh dari proses panjang belajar-mengajar.

Pendidikan Akidah-Akhlak: Sumber “Mala Petaka” dan Humanisme Universal

Sebagai salah satu upaya transformasi sikap akhlak, maka pendidikan (baca: materi pelajaran akidah-akhlak) dapatlah dipandang sebagai sentrumnya. Bagaimana sikap dan perilaku peserta didik (siswa) setelah di sekolah atau di luar sekolah, pelajaran akidah-akhlak ini akan sangat berpengaruh. Ibarat pepatah, maka anak akan baik atau buruk tergantung materi kurikulum akidah-akhlak. Oleh sebab itu, akan sangat mungkin jika model pembelajarannya adalah model pembelajaran sebagaimana pernah diterapkan semasa rezim Orde Baru, maka yang terjadi adalah generasi penerus yang bermental kerdil, berpikiran pendek, dan searah, bukan generasi yang bermental dewasa, mandiri, dan menghargai perbedaan. Pendidikan yang transformatif menjadi pendidikan yang amat mahal, karena yang sesungguhnya terjadi adalah proses semata-mata transfer pengetahuan

yang miskin realitas.

Bagian ini barangkali akan lebih banyak men-*share*-kan pengalaman pribadi penulis semasa sekolah di tingkat lanjutan pertama dan menengah atas. Pendidikan akidah-akhlak yang pernah penulis alami dahulu, semasa sekolah dasar sampai dengan menengah atas, adalah sebuah model pendidikan yang doktriner-dogmatikal, karena itu tidak ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya *debatable*, dan *polyinterpretable*. Semuanya serba monolit, satu dan diseragamkan. Formalisasi syariah sangat kental di sana, sehingga pendidikan akidah-akhlak merupakan pendidikan yang bersifat abstrak, melangit, bukan “membumi”. Mengapa saya katakan abstrak, karena yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia akherat, bukan dunia pada saat ini. Formulasi transendental demikian kuat, sehingga benar-benar menghilangkan dimensi antroposentrisme dalam pendidikan. Semua peserta didik digiring agar memahami “dunia luar” atau “dunia lain”, yang akan diketemukan nanti pada saat kiamat.

Tentu pengajaran tentang hal eskatologis tidak salah, hanya saja amat disayangkan apabila pendidikan akidah-akhlak secara serempak di-*setting* dengan format demikian. Jelas yang terjadi adalah “proses pembisuan” peserta didik karena tidak ada ruang untuk berdebat, apalagi pendidik dengan amat lancar mengemukakan dalil-dalil yang mendukung apa yang diajarkan. Tambahaan lagi, guru-guru di SLTP/MTs atau MA/SMU ketika itu berpenampilan bukan sebagai “kawan” atau “sahabat”, tetapi lebih suka

menampilkan diri sebagai “orang tua” dan “bos” yang celakanya lebih suka memberikan instruksi, atau perintah pada siswa-siswanya untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, sekalipun banyak siswa-siswanya yang sebenarnya protes karena keberatan. Pendidik/guru yang berpenampilan sebagai orang tua atau bos ini biasanya tidak mau peduli, pokoknya tugas-tugas harus diselesaikan, karena kalau tidak bersiap-siaplah untuk tinggal kelas. Ancaman tinggal kelas merupakan ancaman yang menakutkan, karena siswa yang tinggal kelas akan dinilai macam-macam; seperti anak nakal, bandel, pemalas, bodoh dan segudang penilaian yang menyakitkan. Oleh sebab itu, formalisasi pengajaran mendominasi hampir seluruh materi kurikulum akidah-akhlak di MTs maupun MA.

Pengajaran tentang shalat misalnya, guru mengajarkan bagaimana shalat itu harus lengkap sempurna segala doa-doanya, di mana untuk dapat diterima shalat seseorang harus diawali dengan bersuci (wudhu atau tayamum) yang sesungguhnya berbelit-belit. Siku yang tidak terbasuh, muka dan daun telinga yang kurang terkena air, dianggap tidak sempurna, bahkan tidak sah bersucinya. Maka harus dibasuh ulang, apalagi jika terkena najis. Bahkan najis juga bertingkat-tingkat, ada najis kecil, menengah dan besar, di mana ketiga-tiganya mempunyai aturan pensucian yang berbelit-belit dan rumit! Setelah itu, ketika shalat hendak dijalankan maka haruslah hafal betul doa-doanya yang seluruhnya berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia, atau bahasa

daerah di mana khalayak sebagai anggota masyarakat terbiasa menggunakannya sehingga memang sangat familiar. Hal ini karena berbahasa Indonesia atau bahasa daerah menurut guru fiqih adalah tidak diterima dan tidak sah. Hal yang sama juga terjadi pada pengajaran tentang keimanan, atau berkaitan dengan kepercayaan seseorang terhadap agamanya yang dianut beserta implikasinya. Seorang guru akidah akan dengan gencar mengemukakan ayat-ayat dan hadits Nabi yang memang sangat mendukung argumentasinya, sekalipun sayangnya seorang guru (pendidik) biasanya jarang mengemukakan asbabun nuzul atau asbabul wurud sebuah dalil kenapa diturunkan Tuhan dan hadits dikeluarkan Nabi kepada umatnya! Bukan saja karena kebanyakan guru di MTs/MA tidak menguasai secara ketat ilmu-ilmu al-Qur'an atau *Ulumul Qur'an*, tetapi karena memang tak jarang sengaja “menyembunyikan” apa sebab-sebab turunnya dalil tersebut. Yang dikemukakan adalah yang mendukung argumentasinya, tanpa dikemukakan sebab musababnya. Bahkan yang paling celaka adalah terjadinya standar ganda pada guru-guru akidah-akhlak kita. Guru-guru akidah-akhlak seringkali menilai bahwa agamanya yang paling benar, paling lengkap, sementara agama lain di luar agamanya adalah tidak lengkap, bahkan sesat karena itu tidak layak untuk dipelajari, apalagi diikuti.

Dengan formula pendidikan akidah-akhlak seperti itu, maka siswa lebih banyak bersikap mendua (munafik). Apabila di depan guru, dia berpura-pura baik,

penurut, tunduk dan patuh, tetapi gurunya berbalik dimaki-maki dengan segala bentuk umpatan yang jika terdengar amat menyebalkan, bahkan menyakitkan. Guru yang biasanya “digugu dan ditiru”, berubah menjadi “guru itu kecu dan saru!” Amat menyedihkan bukan? Apalagi jika hal seperti ini terjadi pada guru agama, yang mengajarkan akidah-akhlak. Bukankah mala petaka benar-benar telah merasuk pada peserta didik, bukan karena pengaruh lain, tetapi karena pengaruh guru itu sendiri akibat materinya yang menyesatkan. Kemunafikan akhirnya meraja lela di sekolah-sekolah, tetapi siapa yang akan disalahkan! Siswa jelas tidak mutlak salah, guru juga tidak mutlak salah. Yang barangkali perlu dipersalahkan adalah pola pengajaran dan kurikulumnya yang sangat kaku dan dibakukan.

Penekanan pada dimensi transendental yang keras dalam pola pikir akan berakibat pada berkembangnya “teologi jabariah”, yang merupakan teologi yang tidak memberikan ruang perdebatan, sebuah bangunan teologi eksklusif yang cenderung intoleran. Oleh karena itu, bukan saya mempersalahkan aliran Jabariah, tetapi sebagai analog, bahwa pola pendidikan yang sangat menekankan formalisasi dan kekakuan transendental, akan berakibat pada tumbuhnya sikap-sikap pasrah pada keadaan, dan hanya menunggu pada perubahan yang datangnya dari Tuhan. Harus dipahami bahwa pola pengajaran yang teosentris akan melahirkan manusia-manusia yang agak kurang kepekaan sosialnya, dalam arti minus *sense*

of sensibility karena berpatokan pada “jaminan teosentrisme” yang egois. Tuhan dipandang sebagai “hak miliknya”, bukan hak milik orang lain, di samping juga seluruh ibadah hanyalah berkaitan dengan Tuhan, bukan berhubungan dengan manusia. Humanisasi ajaran agama menjadi kering, bahkan berhenti, sehingga nilai-nilai profetik agama-agama terhambat karena egoisme dalam beragama.

Penciptaan sikap mental yang demikian jelas harus segera dihabisi, bukan dilanggengkan karena jika tidak menghabisinya jelas bahwa pendidikan akidah-akhlak yang semestinya akan dapat menjadi berkah bagi seluruh umat manusia berbalik, menjadi “mala petaka”. Mala petaka yang dikemas dalam doktrin-doktrin teologis akibat minimnya pemahaman humanisasi universal yang menjadi kebutuhan bersama. Akidah-akhlak peserta didik yang *disetting* secara rigid akan tumbuh menjadi manusia-manusia seperti para “martir agama”, yang merasa benar sendiri dan mengukuhkan diri sebagai pembela agama yang sejati. Di luar kelompoknya akhirnya akan dianggap salah, bahkan layak untuk dihalalkan darahnya atas nama pembelaan terhadap Tuhan (agama). Sekalipun barangkali Tuhan yang dibela adalah tuhan-tuhan kecil yang berujud formalisasi ajaran agama (A. Munir Mul Khan, 2001).

Pendek kata, paradigma teosentrisme

(egois) yang seringkali dikembangkan dalam pendidikan akidah-akhlak harus dirubah menjadi paradigma antroposentrisme, sehingga mampu menghadirkan Islam yang benar-benar tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang riil, bukan menghadirkan dan melanggengkan Islam yang tidak bersahabat dengan problem riil masyarakat. Sebenarnya pendidikan akidah-akhlak yang mampu menangkap problem sosial kemasyarakatan merupakan pendidikan akidah-akhlak yang mengarah pada pendidikan yang berbasis masyarakat (*community basic*); sebuah pendidikan yang mende-katkan teori atau kerangka ideal dengan realitas sosial yang ada. Dengan kata lain, dapat disebut sebagai pendidikan yang sejalan antara cita dan fakta, bukan pendidikan yang melangit (menggantung). Di mana problem-problem bersama seperti kelaparan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan akan menjadi titik temu dan sentral dari pendidikan akidah-akhlak yang lebih berdimensi universal, ketimbang menekankan pada dimensi teosentrisme (egois) yang melalaikan tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Pendidikan Agama di Masa Depan

Berharap pada sektor pendidikan agama untuk menumbuhkan sikap pluralis,



atau tumbuhnya teologi pluralis, sebenarnya agak berat. Apalagi jika model pendidikan yang dikembangkan adalah model pendidikan yang sama dengan model rezim Orde Baru, seperti telah disebutkan di awal. Pesimisme senantiasa menghantui banyak orang, namun tidak berarti sudah mencapai titik nadir untuk berharap tumbuhnya pendidikan Islam yang menghargai pluralisme yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kita ini. Pesimisme terhadap pendidikan Islam yang menghargai pluralisme ini cukup beralasan, jika yang terus dikembangkan adalah model pendidikan doktriner-dogmatikal, bukan pendidikan yang komunikatif-transformatif, sehingga sikap toleran benar-benar bisa ditumbuhkan. Karena dengan pendidikan yang bersifat doktriner-dogmatikal akan menciptakan apa yang disebut sebuah “toleransi yang malas” atau “toleransi negatif” (Bahtiar Effendy, 2001b).

Untuk menuju sebuah pendidikan Islam yang menghargai pluralisme, sebenarnya selain aspek kurikulum (khususnya akidah-akhlak) yang harus dirubah muatan-muatannya, juga aspek pendekatan dalam pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan atau pengajaran agama harus segera dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan komunikatif. Aspek perbedaan harus menjadi titik tekan dari setiap pendidik. Pendidik harus sadar betul bahwa masing-masing peserta didik merupakan “manusia yang unik” (*human unique*), karena itu tidak boleh ada penyeragaman-penyeragaman (Sindhunata,

2001a). Penyeragaman-penyeragaman bukan saja akan mematikan kreativitas, namun akan membunuh daya cipta dan kemampuan yang telah ada sebelumnya. Pendidikan karena itu harus dipahami untuk melakukan pembaruan (*innovation*) yang mengarah pada perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa menjadi sesuatu yang sudah *fixed*, tetapi senantiasa berubah-ubah sesuai perkembangan yang terjadi. Dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, maka kurikulum akidah-akhlak juga harus dipahami sebagai materi yang harus senantiasa memperhatikan perubahan tersebut, karena jika tidak memperhatikan perubahan-perubahan yang ada, pelajaran akidah-akhlak akan menjadi sebuah “kerangkeng” atau penjara-penjara yang diperkuat di dalam kelas dengan kursi-kursi tempat duduk yang hanya pas untuk satu orang, jam pelajaran yang ketat dengan mata pelajaran lain, guru yang bekerja seperti “sipir penjara” dan beberapa “penjara” lainnya.

Agar pendidikan akidah-akhlak tidak menjadi “penjara”, maka harus diupayakan agar tidak membosankan serta mengenai tujuan atau sasaran; yakni memberikan ruang pada anak-anak untuk menyampaikan ekspresi yang berbeda-beda dengan keunikan yang dimilikinya. Salah satu cara memberikan kebebasan terhadap siswa adalah melalui berbagai pendekatan. Beberapa kemungkinan pendekatan yang bisa dikembangkan dalam rangka mengajarkan Islam (akidah-akhlak) kepada peserta didik sehingga tidak menjadikan

siswa sebagai manusia mekanis dan berpikir satu arah.

Pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini mengandaikan bahwa materi akidah-akhlak diajarkan kepada siswa dengan menengok kembali ke belakang; maksudnya adalah agar pendidik dan peserta didik (siswa) mempunyai kerangka berpikir yang komplet sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang dan mendatang. Pendidikan dengan pendekatan historis harus dilakukan secara kritis-dinamis, dalam pengertian seorang pendidik harus mampu menjadikan siswa sebagai pihak yang memiliki kedudukan sama sehingga berhak mengkritik sipendidik atas apa yang dikemukakan. Perbedaan pendapat oleh sebab itu menjadi hal yang harus dibiasakan demi menemukan kebenaran sejarah secara bersama.

Dengan pendekatan historis, pendidikan akidah-akhlak ditinjau secara mendalam sampai akar-akarnya. Misalnya mengajarkan tentang iman kepada Tuhan, maka ditelusuri sampai akar sejarah kapan manusia beriman, apa sebab-sebabnya, mengapa ada yang tidak mau beriman, di masyarakat mana, kapan, lantas mereka mengimani siapa. Pendek kata, penelusuran secara kesejarahan menjadi titik tekan dan dikemukakan secara terbuka, jujur dengan senantiasa membuka diri untuk perbedaan pendapat. Sejarah dikemukakan sebagai fakta, bukan sebagai kemestian yang harus diikuti dan dibenarkan. Apa yang baik dari sejarah dikatakan sebagai hal yang baik, sedangkan yang buruk juga dinyatakan sebagai fakta yang buruk. Penilaian

diserahkan kepada peserta didik, bukan pada pendidik yang mengajarkan. Pendidik dalam kerangka ini adalah "pemberi berita" yang menyampaikan.

Contoh lain misalnya, pendidik hendak menyampaikan materi akhlak, maka pendidik dapat mengemukakan sejarah orang-orang yang dianggap memiliki akhlak mulia, seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab atau Ali bagaimana kehidupan mereka dalam berkeluarga, bermasyarakat, sikapnya dengan orang yang berbeda agama, dengan yang sama agamanya, dengan mereka yang miskin, dan dengan yang kaya. Bahkan apabila dimungkinkan pendidik harus pula mengemukakan contoh yang datang dari orang yang tidak secara tegas mengatakan beragama Islam, Paus Johannes VII, Martin Luther, MK. Gandhi, Sidharta Gautama, misalnya, atau siapa saja yang dianggap memiliki kelebihan-kelebihan. Contoh ini diambil untuk kemudian dikemukakan secara kritis berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang pernah terjadi, bukan dikarang oleh si pendidik agar siswa tertarik pada apa yang dikehendaki pendidik.

Pendekatan historis ini sebenarnya merupakan pendekatan yang mencoba mendekatkan kejadian-kejadian di masa lampau yang biasanya mensejarah, kemudian dikonfrontasikan dengan norma-norma yang ada. Atau dengan bahasa lain dapat dinyatakan bahwa pendekatan historis adalah pendekatan "konfrontatif antara historisitas dan normativitas" (M. Amin Abdullah, 1998). Dalam konfrontasi ini kadangkala antara realitas sejarah masyarakat dengan norma

yang dinyatakan dalam kitab suci berlainan, sehingga menimbulkan semacam *confuse* tersendiri, bukan hanya bagi siswa namun juga pendidik. Tetapi, itulah realitas yang harus dikemukakan.

Kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini mengandaikan terjadinya proses “kontekstualisasi” atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya, atau datangnya di masa lampau. Kontekstualisasi ini dalam kerangka berpikir Islam bisa diidentikan dengan ijtihad (inovasi/pembaruan) atas apa yang dulu pernah dipahami. Dengan pendekatan sosiologis akan membawa materi akidah-akhlak (Islam) pada umumnya lebih aktual. Dia aktual bukan karena dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Keaktualan materi akidah-akhlak bukan karena argumentasi yang dibuatnya sendiri sebagai bentuk *truth claim* atas kebenaran Islam, tetapi berdasarkan keterangan-keterangan yang senantiasa ada dasar argumentasinya dan dikemukakan secara terbuka.

Dengan pendekatan sosiologis dalam mengajarkan akidah-akhlak akan memberikan pertolongan pada siswa untuk memiliki pijakan bagaimana memotret secara dalam kondisi sosial masyarakat di mana berada, sehingga apa yang didapatkan di bangku sekolah tidak mengharuskannya “membanting setir” karena ternyata fenomena yang dihadapi di masyarakat merupakan fenomena yang benar-benar baru, yang tidak ada sama sekali dalam kehidupan masa kini, hanya dalam angan-angan semata. Pendidikan akidah-akhlak

dengan pendekatan sosiologis secara tegas dapat dikatakan sebagai pengajaran yang tidak menekankan pada adanya indoktrinasi, karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kontekstual kekinian. Di sinilah kemudian peluang terbukanya “wacana pluralisme” menjadi sangat dimungkinkan. Berbeda dengan pendekatan doktrinal-dogmatikal yang lebih menekankan adanya “pembelaan-pembelaan” atas apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Pendekatan sosiologis tidak demikian. Kitab suci tetap sebagai rujukan, tetapi dengan melihat kondisi masyarakat di mana itu terjadi dan untuk siapa diajarkan atau dikabarkan.

Ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan kultural merupakan pendekatan dalam pendidikan akidah-akhlak yang menekankan pada aspek otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan kultural, siswa akan memahami apa yang sebenarnya menjadi tradisi dan mana yang otentik, orisinal. Pendekatan ini akan bermanfaat untuk menyelidiki secara mendalam berkaitan dengan masih bercampur aduknya antara yang orisinal dengan yang tradisi-tradisi Arabian, sehingga banyak umat Islam yang salah memahami mana yang tradisi dan mana yang datangnya dari Islam. Disebabkan karena tidak adanya kejelasan mana yang tradisi dan mana yang otentik Islam, maka sering terjadi pembelokan-pembelokan atas apa yang semestinya profan menjadi sakral dan yang sakral menjadi profan. Apa yang bisa dievaluasi dan dikritik menjadi mutlak adanya, yang dalam bahasa Nurcholish Madjid diistilahkan sebagai wilayah sakral

dan wilayah profan (sekuler).

Percampuradukan antara tradisi Islam dengan *pure* Islam menjadi agenda yang serius harus dipikirkan oleh pendidik karena jika diteruskan akan menyebabkan tumbuhnya “tradisi-tradisi” yang dianggap *pure Islam*. Apa yang tradisi harus dikemukakan sebagai tradisi, sedangkan apa yang *pure Islam* juga harus dikemukakan sebagai Islam. Dengan pendekatan kultural akan menolong siswa untuk bisa memahami tradisi-tradisi yang pernah terjadi dan ada di masa lampau dalam masa pra Islam, masa Islam dan kejayaan Islam, dengan segala karakteristik yang terjadi di sana. Dengan pendekatan kultural juga akan memungkinkan para siswa memiliki perspektif yang memadai untuk memilah mana yang tradisi dan mana yang bukan tradisi, sehingga memungkinkan tumbuhnya sikap menghargai tradisi yang berbeda-beda dan melanggengkan jika memang baik serta meninggalkan jika memang tidak perlu diikuti. Di sinilah apa yang menjadi tugas pendidik memberikan gambaran secara jelas antara tradisi dan Islam, bukan membalikkan tradisi menjadi Islam, sedangkan Islam menjadi tradisi.

Berhubung pelajaran akidah-akhlak merupakan pendidikan karakter, maka pengajarannya tidak secara instruktif, ceramah, namun lebih banyak dengan cara reflektif, *share* dan diskusi sehingga siswa dapat mengerti secara konkret apa yang menjadi misi dari kurikulum, sekalipun seringkali karena “kurikulum formal” paket dari pusat merupakan kurikulum yang kaku, maka pendidik lebih banyak harus

mengajarkan “kurikulum tersembunyi”, sebuah kurikulum yang tidak tercantum dalam garis-garis besar haluan belajar-mengajar. “Kurikulum tersembunyi” merupakan kurikulum yang akan membawa siswa pada karakter asli, bukan dibuat-buat sehingga siswa bersifat munafik (Sindhunata, 2001b). Pendek kata, pendidikan akidah-akhlak adalah sebuah pelajaran yang lebih berorientasi pada praksis ketimbang teori.

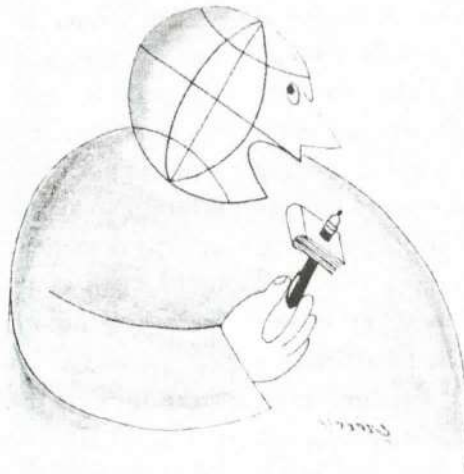
Keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan pelajaran akidah-akhlak secara psikologis merupakan pendekatan yang memperhatikan situasi psikologi orang-perorang (siswa demi siswa) secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing siswa dilihat sebagai manusia mandiri dan *unique* dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan pada siswa kelas satu MTs tentu tidak sama dengan siswa kelas tiga MTs, apalagi antara siswa kelas satu MTs dengan siswa kelas tiga MA. Pendidikan berperspektif psikologis akan membantu siswa mengembangkan daya kreasi dan kemampuan yang dimiliki. Pemaksaan-pemaksaan tidak terjadi di sana. Mendidik anak berusia belia tentu tidak sama dengan mendidik anak dewasa (remaja).

Berhubung siswa dalam satu kelas, apalagi satu sekolah itu berbeda-beda, baik jenis kelamin, umur maupun daya tangkap dan kemampuan/ketrampilannya maka pengajaran yang melakukan generalisasi merupakan pendekatan dalam proses pendidikan yang tidak efektif. Yang paling memungkinkan sebenarnya bagaimana pendidik mendidik agar siswa menjadi

manusia yang memahami karakter yang dimiliki dan memahami dunia. Kemampuan untuk memahami diri dan dunia hanya akan muncul melalui keikutsertaan di dalam konteks yang membuat realitas bermakna. Pendidik harus memahami bahwa kehidupan sehari-hari dengan segala kejadian-kejadian yang muncul merupakan pengalaman yang sangat berfaedah dalam membentuk karakter seseorang, baik secara intersubjektif maupun secara sosial, sehingga dapat menghasilkan situasi tertentu (Karlina Leksono Supeli dalam Sindhunata, 2001 b).

Dengan pendekatan psikologis akan memungkinkan siswa menjadi manusia “pembelajar” yang dengan segala informasi akan dapat secara progresif mengorganisasikan dan memperkaya apa-apa yang sudah diketahui, bukan malah mematikannya. Namun, juga harus diketahui oleh para pendidik bahwa pemahaman tidak berarti semata-mata kognisi yang eksklusif didefinisikan sebagai keberhasilan pencapaian intelektual, latihan-latihan tetapi lebih diorientasikan pada fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar.

Kelima, pendekatan estetik. Pendekatan dalam pelajaran akidah-akhlak secara estetik sebenarnya akan menjadikan siswa memiliki sifat-sifat yang santun, damai,



ramah dan mencintai keindahan. Mengapa? Karena dalam perspektif ini pelajaran akidah-akhlak tidak didekati secara doktrinal yang cenderung menekankan adanya “otoritas-otoritas” kebenaran agama tertentu, tetapi lebih apresiatif terhadap

gejala-gejala yang terjadi di tengah masyarakat yang dilihat sebagai bagian dari dinamika hidup yang bernilai seni, estetik. Pendekatan secara estetik sebenarnya pernah dijalankan oleh para penyebar Islam *tempoe doloe*, era Wali Songo di Jawa dengan karakternya sendiri. Para wali konon mengajarkan ketauhidan dengan cara mengapresiasi seni-seni yang berkembang di tanah Jawa, khususnya yang ketika itu masyarakatnya masih bercampur baur dengan tradisi Hinduisme dan Sinkretisme Jawa.

Pendekatan estetik dalam mengajarkan akidah-akhlak merupakan pendekatan yang mencoba membawa siswa pada alam rasa, di mana mereka dilatih untuk mengolah rasa dan kepekaan terhadap sesama. Berbagai macam rasa yang dimiliki manusia seperti rasa memiliki, ingin memimpin, dicintai, dihormati, menyenangkan keindahan semuanya digelar secara memadai untuk kemudian berkembang secara bersama-sama. Tidak ada yang dimatikan salah satunya. Adalah persoalan yang pelik ketika anak-anak remaja kita seusia siswa MTs dan

MA kerjanya setiap hari tawuran di jalanan antarsesama siswa yang berbeda sekolah untuk kemudian dibawa pada olah rasa yang memadai. Tetapi inilah yang sebenarnya harus diusahakan oleh seorang guru akidah-akhlak agar mereka benar-benar memiliki jiwa yang tulus dan mencintai sesama. Apalagi jika kita (terutama para pendidik) meyakini bahwa pendidikan secara umum merupakan sarana untuk memerdekakan manusia, memandirikan dan membentuk manusia berkarakter, maka pemekaran rasa menjadi sentral untuk diperhatikan. Egoisme diri yang biasanya muncul pada pribadi-pribadi yang tengah berkembang perlahan-lahan akan berubah menjadi "solidaritas sosial" karena perasaan senasib yang tumbuh dari sifat lemah lembut dan pendamai. Perbedaan akhirnya dianggap hal yang wajar dan biasa.

Keenam, pendekatan berperspektif jender. Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan dalam pengajaran akidah-akhlak yang tidak membedakan jenis kelamin karena sebenarnya soal jenis kelamin bukan penghalang bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Dihadapan Tuhan juga jelas yang akan dinilai bukan karena jenis kelaminnya, tetapi nilai ketakwaannya (kesalehannya). Jika pada akhirnya soal jenis kelamin itu menjadi persoalan yang seakan-akan fundamental dalam wacana feminis atau kesetaraan, hal ini karena seringkali hal-hal yang sifatnya mitologi kemudian dicari-cari dasar legitimasinya, terutama melalui jalur agama dan tradisi yang berkembang. Pendekatan berperspektif

jender karena itu merupakan pendekatan yang sangat manusiawi. Kekurangmanusiawian dalam pengajaran seringkali menyebabkan kekerdilan dan sikap ingin merubah diri. Seperti pernah ditemukan dalam sebuah survei bahwa kebanyakan guru-guru serta anak-anak perempuan di Yogyakarta ingin merubah jenis kelamin menjadi laki-laki karena kebanyakan guru mendidik tidak menerapkan kesetaraan dan keadilan jender. Dalam pandangan mereka menjadi laki-laki ternyata lebih enak dan lebih menjanjikan (Mary Astuty, dalam Sindhunata, 2001).

Sejalan dengan pendekatan ini sebenarnya mengarah pada kejelasan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Di mana dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan tata cara bersosialisasi sehingga dapat mempelajari misteri-misteri yang terjadi dalam alam dan meningkatkan kualitas kehidupan sejajar dengan manusia lain. Agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan, atau mereka yang "terpinggirkan" baik laki-laki maupun perempuan, maka pendidikan harus disampaikan dengan perspektif yang membela keadilan atas kaum terpinggirkan, mengingat dalam beberapa kasus perempuan ternyata lebih terpinggirkan, karena itu harus dikerjakan mulai sekarang. Pendidikan berperspektif jender harus dimulai bukan hanya di sekolah lewat pelajaran akidah-akhlak, tetapi juga di rumah, sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan.

Bias-bias jender di sekolah yang terjadi

seperti dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, atau yang lain harus segera diakhiri untuk menuju pendidikan yang berkeadilan dan non-diskriminatif. Hal semacam ini perlu disadari karena seorang siswa atau anak lahir bukan karena kehendak sendiri. Jelas seandainya boleh memilih dan akibatnya diketahui, bahwa perempuan itu akan lebih diperdaya di sekolah maupun di masyarakat, maka semua orang ingin lahir menjadi laki-laki atau menjadi orang yang tidak terpinggirkan. Perlakuan terhadap siswa perempuan yang seringkali dituduh tidak atau kurang tegas, terlalu menekankan rasa harus segera dihentikan. Pendidik harus menumbuhkan sikap dan mental peserta didik agar menjadi manusia yang *self confidence* sehingga berkembang menjadi generasi yang benar-benar mandiri dan militan. Hal seperti ini yang sebenarnya tertuang dalam kitab suci al-Qur'an dan banyak hadits Nabi, namun seringkali tidak dikemukakan secara transparan oleh seorang pendidik.

Penutup

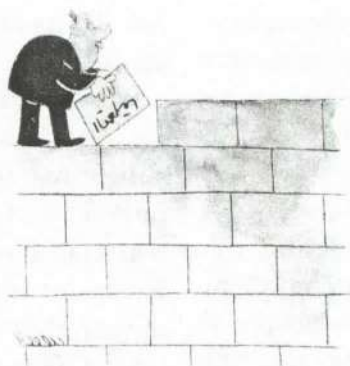
Beberapa catatan tentang kondisi pendidikan Islam semasa rezim Orde Baru yang demikian rigid, dan doktriner karena politisasi harus segera diakhiri. Demikian pula beberapa catatan tentang metode dalam pendidikan akidah-akhlak di atas harus dilakukan secara silmtan, karena tidak satu metode pun yang paling sempurna. Ini harus disadari oleh pendidik sehingga pendidikan akidah-akhlak di kemudian hari benar-benar menjadi pendidikan yang mendidik manusia berkarakter sejati dan mandiri, bukan

bersifat munafik seperti sebelumnya telah terjadi.

Kita harus mengingat bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultur. Oleh sebab itu dalam masyarakat multikultural, pendidikan juga harus mengarah pada perkembangan masyarakat multikultural, bukan masyarakat monokultur. Masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia, sehingga jelas pengakuannya terhadap masing-masing individu yang *unique*. Dalam masyarakat multikultural, pertemuan-pertemuan nilai-nilai senantiasa terjadi sehingga membentuk pandangan manusia yang berbeda-beda. Pertemuan nilai-nilai ini juga merupakan dinamika dari *human being* yang berkembang dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pendidikan akidah-akhlak sudah sewajarnya jika ditanamkan unsur-unsur universal dari nilai agama-agama.

Dengan menghargai multikultur yang terdapat pada masing-masing peserta didik, maka dengan sendirinya sebenarnya pendidik telah "mempersiapkan" mereka menuju sebuah masyarakat yang multikultur, di mana masyarakat tersebut nantinya akan menuju sebuah masyarakat yang hidup dalam demokrasi, bukan kehendak hanya mengikuti yang mayoritas dan otoritas semata. Apresiasi atas kreativitas dan ketrampilan diberikan porsi yang memadai karena mengutamakan keadilan. Berhubung masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang

demokratis, maka pendidikan akidah-akhlak di sekolah menengah (MTs) dan tingkat atas (MA) sudah semestinya diajarkan dalam format yang “terbuka” terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang terjadi di masyarakat. Pendidikan akidah-akhlak



tidak semata-mata diajarkan dengan model doktriner, karena jelas tidak memenuhi kriteria pendidikan yang membebaskan dan memandirikan manusia. Pendidikan transendental penting, tetapi yang bersintesa dengan teori agaknya lebih penting dikerjakan sekarang. Karena sekolah-sekolah yang hanya berorientasi pada pendidikan “material” akan mempermudah pada proses matinya sekolah itu sendiri (Neil Postman, 2001). Pendidikan agama Islam (termasuk akidah-akhlak) harus dirumuskan menjadi sebuah pendidikan yang menuju pendidikan teologi agama-agama. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang diangkat dari nilai-nilai universal agama-agama, diangkat dari realitas lapangan sehingga tidak “melangit”, tetapi “membumi”. Dengan rumusan pendidikan akidah-akhlak yang berperspektif agama-agama, maka pendidikan Islam (akidah-akhlak) akan menjadi sebuah pendidikan yang mampu merespon persoalan-persoalan kontemporer. Di situlah sebenarnya pusat universalisme pendidikan Islam yang tidak menjadikan perbedaan agama-agama, suku, ras dan antargolongan sebagai lahan pertikaian, tetapi persaudaraan sejati. Generalisasi atas

fenomena yang kita temukan di lapangan karena itu harus dihilangkan, apalagi generalisasi *prejudice* atas mereka yang beragama lain, karena hal ini tidak akan menemukan apa yang kita sebut teologi pluralis, tetapi teologi eksklusif.⁶⁰

Daftar Pustaka

- M. Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas dan Historisitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1997
- Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam : Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Galang Press, Yogyakarta: 2001
- _____, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan : Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kerja*, Galang Press, Yogyakarta: 2001
- Neil Postman, *Matinya Pendidikan : Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah*, Jendela, Yogyakarta: 2001
- Sindhunata, (ed), *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Kanisius, Yogyakarta: 2001
- _____, *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita : Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*, Kanisius, Yogyakarta: 2001
- Th Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Insterfidei-Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001